

Skripsi

**ANALISIS POTENSI PAJAK REKLAME DAN KONTRIBUSINYA
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN OKI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Nama : Intan Prawesti

NIM : 22 2010 211

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2014**

Fakulta Ekonomi dan bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

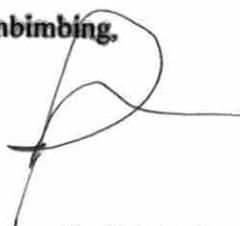
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Potensi Pajak Reklame dan Kontribusinya
Terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Dinas
Pendapatan Daerah kabupaten OKI

Nama : Intan Prawesti
NIM : 222010211
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Des 2014

Pembimbing,



Hasyim, H. S.E.M.Si
NIDN: 0012036101

Mengetahui
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi




Rosalina Ghozali, SE., Ak. M.Si
NIDN: 0228115802/1021961

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Intan Prawesti

NIM : 22.2010.211

Program studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, Agustus 2014

Penulis



Intan Prawesti

MOTTO & PERSEMBAHAN

Motto :

"Belajarlah dari kesalahan di masa lalu, mencoba dengan cara yang berbeda dan selalu berharap untuk sebuah kesuksesan di masa depan"

(Penulis)

*Dengan izinmu dan dengan rahmad Mu ya Allah
Skripsi ini kupersembahkan untuk :*

- ❖ Bapak dan Ibuku tercinta yang
tulus dan ikhlas mendidik, membesarkan
dan mendorong ku dalam mewujudkan
cita-citaku*
- ❖ Abang, kakak dan adik-adikku
tersayang*
- ❖ Sahabat dan teman-teman
seperjuanganku*
- ❖ Almamater tercinta*



PRAKATA

Assalamu,alaikum wr,wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa berkat taufik dan hidayah serta karunia dan perkenaan-Nya jualah, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Potensi Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKI” dalam rangka memenuhi salah satu syarat bagi setiap Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang serta tak lupa penulis panjatkan shalawat teriring salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan untuk Ayahanda (MB. Iskandar) dan Ibunda (Yusniwati) yang sangat kusayangi dan kubanggakan, terima kasih atas semua yang telah kalian berikan, tiada kata paling indah selain doa yang bisa kuberikan untukmu “*wahai Tuhanku kasihilah dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihiku dan menyayangiku sewaktu aku kecil*”. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada abang, kakak dan adik-adikku karena tanpa semangat dan doa dari kalian maka semua ini tak mungkin ku dapatkan.

Penulis menyadari sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam menyusun skripsi. Namun masih banyak kekurangan dan kesalahan baik dari segi kata-katanya, referensinya dan lain sebagainya. Meski demikian, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Keberhasilan penulis selama ini menjalankan studi di Universitas Muhammadiyah Palembang dan dalam penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan semua pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. M. Idris, S.E,M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Abid Djazuli, S.E,M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. IbuRosalina Ghazali, S.E, Ak, M.Si, selaku ketua program Studi Akuntansi dan Ibu Welly, S.E, M.Si, selaku staf Program Studi Akuntansi.
4. Bapak Muhammad Hasyim. H.,S.E, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Lis Djuniar, S.E, M.Si, selaku pembimbing akademik.
6. Seluruh Staff dan Karyawan/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

7. Ayahku MB.Iskandar dan Ibuku Yusniwati serta Kakak dan adik-ku Yuliando prima, Ratih Citra Pratiwi, Diyas Satra, Tasya Makasuci yang telah memberikan do'a, materi, dan semangat untuk keberhasilan penulis.
8. Sahabat seperjuangan dan keluargakudi (Heny,Siska,Elsa,Doni,Fitri,kiki).

Akhirnya, penulis mendo'akan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian yang telah membantu dengan tulus dan ikhlas. Akhir kata,penulis berharapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi penulis dimasa-masa yang akan datang.

Amin Yaa Rabbal 'Alamin.

Palembang, Agustus 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRAKATA.....	v
HALAMAN DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	x
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRACT	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Perumusan masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya.....	9
B. Landasan Teori.....	10
1. Pajak.....	11
2. Potensi.....	14
3. Pajak Daerah.....	17
4. Pajak Reklame.....	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian.....	27
B. Tempat penelitian.....	29
C. Operasionalisasi variabel.....	27
D. Data yang diperlukan.....	30
E. Teknik Pengumpulan data.....	29
F. Analisis data dan analisis data.....	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	32
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	56

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel I.1	Target dan realisasi PAD tahun 2010-2013	2
Tabel I.2	Target dan realisasi pajak reklame tahun 2010-2013	5
Tabel II.1	Penelitian Sebelumnya.....	9
Tabel III.1	Operasionalisasi variabel	29

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Pernyataan Selesai Penelitian
- Lampiran 2 Foto Copy Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 Foto Copy Sertifikat Hafalan Membaca Surat-Surat Pendek Al-Qur'an
- Lampiran 4 Foto Copy Sertifikat KKN
- Lampiran 5 Foto Copy Sertifikat TOEFL
- Lampiran 6 Biodata Penulis

ABSTRAK

Intan prawesti/222010211/2014 analisis potensi pajak reklame dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah Kabupaten OKI/Perpajakan.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah berapa besar potensi pajak reklame dan berapa besar kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah Kabupaten OKI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi pajak reklame dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah Kabupaten OKI.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif, data yang digunakan penelitian ini adalah data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menganalisis dan menjelaskan dalam meningkatkan potensi pajak reklame dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah Kabupaten OKI.

Kata Kunci : potensi pajak reklame

ABSTRACT

The potential analysis of advertisement tax and its contribution to the local tax revenue in Kabupaten OKI.

The formulation of the problem in this study was how the potential of advertisement tax is and its contribution to local tax revenues in local revenue offices in Kabupaten OKI. The objective of this study was to find the potential advertisement tax and contribution to the local tax revenue in Kabupaten OKI.

This study was a descriptive study: it used primary and secondary data. In collecting the data, the writer did documentation and interviews. Data analysis method used was qualitative method to analyze and explain the increasing potential of advertisement tax and contribution to local tax revenues in local revenue offices OKI.

Keywords : advertisement tax potential

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah. Pembangunan asli daerah dapat terlaksana dengan baik, benar dan berkesinambungan apabila disertai dengan pendanaan yang cukup memadai. Sumber dana untuk membiayai pembangunan daerah tersebut, diperoleh dari pajak daerah dan bantuan pemerintah pusat atau subsidi dalam bentuk dana penggunaan. Setelah pemberlakuan undang-undang otonomi daerah subsidi dari pemerintah pusat menjadi kurang perannya. Hal ini menyebabkan pemerintah harus berusaha seoptimal mungkin untuk meningkatkan penerimaan dana berasal dari pajak daerah.

Pemerintah daerah dituntut agar dapat bersifat proaktif dalam meningkatkan penerimaan keuangan daerah dengan menggali potensi yang ada di daerah. Pemerintah daerah harus meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin dalam menggali sumber dana yang potensial sebagai pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

Apabila pelayanan publik dengan pajak harus membayar tanpa memperdulikan apakah dia menikmati secara langsung jasa public tersebut atau

tidak. Hal tersebut karna pajak merupakan iuran masyarakat kepada Negara yang tidak memiliki jasa timbal balik terhadap individual yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak. Pelayanan public yang dibiayai melalui pembebanan langsung, maka yang membayar adalah mereka yang memanfaatkan jasa pelayanan publik tersebut, sedangkan yang tidak menggunakan pelayanan publik tidak diwajibkan untuk membayar pajak.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah memerlukan pendanaan yang merupakan sumber pendanaan daerah. Dapat kita rasakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin terasa kontribusinya yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung dan memelihara hasil pembangunan yang telah di laksanakan, jadi dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berikut adalah data Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2010 sampai 2013.

Tabel I.1
Target dan Realisasi PAD di Kabupaten OKI
Tahun 2010-2013

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD
2010	32.506.223.063	29.862.867.212
2011	43.890.922.353	47.387.144.367
2012	57.187.743.118	54.692.346.473
2013	75.172.656.251	68.643.024.166

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKI 2014

Pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah salah satunya adalah pajak reklame, pajak reklame merupakan salah satu sumber potensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten OKI. Berhubungan dengan hal tersebut maka yang sering kali menjadi hambatan bagi daerah adalah kemampuan keuangan daerah. Dimana wewenang daerah terhadap pembiayaan pelaksanaan pemerintahan masing-masing yang merupakan bentuk dari adanya kebijakan otonomi daerah menuntut pemerintahan untuk lebih kreatif serta memacu kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak Reklame. Dasar hukum pengenaan pajak reklame adalah undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan distribusi daerah.

Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam penjelasan pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa pajak reklame adalah pajak atas reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media menurut bentuk corak ragam untuk tujuan suatu barang, jasa, atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau dilihat, dibaca, didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan pemerintah.

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pemesanan reklame dan wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang

menyelenggarakan reklame. Dasar pengenaan pajak reklame adalah sewa reklame dengan memperhatikan lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame. Perhitungan dasar pengenaan pajak reklame ditetapkan dengan peraturan daerah. Tarif pajak reklame Kabupaten OKI adalah sebesar 25%.

Peraturan daerah no 22 tahun 2010 tentang pajak reklame menyebutkan bahwa setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame dalam daerah OKI dipungut pajak reklame melalui dinas pendapatan daerah. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, dinas pendapatan daerah ditetapkan sebagai unit kerja yang melaksanakan akan proses penelitian administrasi dan penelitian teknis dalam rangka pemungutan pajak reklame, sesuai dengan persyaratan, mekanisme dan prosedur penetapan pemungutan pajak reklame.

Pemungutan pajak reklame Kabupaten OKI diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2004 tentang dasar pengenaan dan tarif pajak reklame Kabupaten OKI. Melihat potensi yang ada, penerimaan daerah yang berupa pajak terkait dengan sektor yang berkembang dan perlu lebih dimaksimalkan. Dimana berdasarkan data yang ada dari tahun 2009-2013 ada beberapa pajak yang mengalami penurunan.

Salah satu pajak yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya adalah Pajak Reklame. Namun kenyataannya pajak tersebut selama ini tidak pernah mampu mencapai target yang ditetapkan. Salah satu faktor yang dianggap mempengaruhi terhadap kondisi demikian adalah belum

optimalnya cara perhitungan antara potensi yang ada dengan keadaan dan kondisi yang terdapat di kabupaten OKI, serta masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh aparatur petugas pajak di kabupaten OKI. Dengan melihat potensi yang ada penerimaan daerah yang berupa pajak daerah yang terkait dengan sektor yang perlu lebih dimaksimalkan.

Pada tabel I.2 dapat dilihat besarnya target yang diharapkan akan diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten OKI dibandingkan dengan besarnya realisasi penerimaan pajak reklame yang terjadi serta proporsi target dari penerimaan pajak reklame terhadap realisasi penerimaan pajak reklame.

Tabel 1.2
Target dan realisasi Pajak Reklame Kabupaten OKI
Tahun 2010-2013

Tahun	Target	Realisasi	%
2010	242.383.000	216.971.000	89.51
2011	290.000.000	274.047.950	94.49
2012	360.000.000	355.878.500	98.85
2013	394.799.750	362.011.100	91.69

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKI 2014

Berdasarkan pada table I.2 dapat diketahui bahwa pada tahun 2010-2013 persentase realisasi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah mengalami penurunan. Hal ini menggambarkan optimal dan tidak optimalnya pencapaian potensi pemungutan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKI.

Tolak ukur yang bisa dilihat dalam mengukur potensi suatu daerah sebagai dasar dalam pengenaan suatu pajak daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Upaya Pajak

Upaya pajak yaitu mengukur kemampuan membayar pajak yang telah ditetapkan secara objektif, dimana dimana ukuran ini berpijak pada anggaran pemerintah daerah memiliki wewenang mengenakan pajak dan menetapkan tarif pajak.

2. Hasil Guna

Hasil Guna yaitu mengukur sejauh mana hubungan yang bisa dilihat dari pungut suatu pajak dan potensi hasil pajak reklame dengan beranggapan bahwa semua wajib pajak membayar pajak masing-masing dan menghitung masing-masing.

3. Daya Guna

Daya Guna yaitu dengan mengukur bagian hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya memungut pajak bersangkutan. Daya Guna juga akan lebih besar bila biaya pungut ditekan serendah mungkin terhadap hasil pajak.

Dalam hubungannya dengan realisasi penerimaan pajak reklame yaitu bagaimana realisasi penerimaan sesuai dengan target yang ditetapkan, didasari pada potensi pajak tersebut sebagai penerimaan daerah untuk membangun dan mengembangkan daerah sehingga menjadi daerah yang maju.

Hal –hal yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan pajak reklame dikarenakan banyaknya reklame yang tidak terdaftar di dinas pendapatan daerah dan sedikitnya wajib pajak yang memasang atau menggunakan jasa reklame sehingga tidak tercapainya target penerimaan pajak daerah. Hal ini dapat

menimbulkan kerugian bagi dias pendapatan daerah dalam pemungutan pajak reklame.

Dinas pendapatan daerah kabupaten OKI perlu melakukan upaya untuk memperbaiki pemungutan pajak reklame sehingga pendapatan daerah meningkat. Penerimaan pendapatan asli daerah yang tetap apabila realisasi penerimaan pendapatan asli daerah setelah dipotong biaya pemungutan hasilnya tetap melebihi jumlah anggaran yang ditetapkan. Untuk pemerintahan daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatan tersebut efisien atau tidak.

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dilihat permasalahan yang ada dalam pengelolaan pajak reklame di Kabupaten OKI, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul:

“Analisis Potensi Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKI”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka perumusan masalah dalam usulan penelitian ini adalah : Berapa besar potensi pajak reklame dan berapa besar kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah Kabupaten OKI.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui potensi pajak reklame dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKI.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai prosedur pemungutan pajak reklame dan kontribusinya terhadap pajak daerah pada dinas pendapatan daerah Kabupaten OKI.

2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam pengelolaan pajak reklame pada dinas pendapatan daerah Kabupaten OKI, sehingga dapat mendorong perusahaan mencapai tujuan dimasa yang akan datang.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau kontribusi terhadap pemikiran dan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang dengan masalah di atas.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Tabel II.1
Penelitian Sebelumnya

No	Judul Penelitian	Tahun	Hasil analisis	Persamaan dan perbedaan
1.	Analisis prosedur pajak reklame dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah kabupaten banyuasin (Rini Octarina)	2007	Hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya analisis anggaraada daerah kab banyuasin adalah faktor internal dan eksternal	Persamaan: meneliti pajak reklame. Perbedaan: terletak pada objek penelitian.
2.	Analisis penerimaan pajak reklame kota serang (Dini Nurmayasari)	2009	Peranan dari penerimaan pajak reklame tiada tahunnya selalu mengalami peningkatan	Persamaan: meneliti pajak reklame. Perbedaan: terletak pada objek penelitian
3.	Analisis peranan dan kontribusi pajak reklame terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota jambi (Lili Syafitri)	2012	Kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah menurun dari tahun 2007-2011	Persamaan: meneliti pajak reklame. Perbedaan: terletak pada objek penelitian

Sumber: Penulis 2014

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh:

1. Rini Octarina (2007) dengan judul: Analisis Prosedur Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Panerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin. Perumusan masalah dalam penelitian tersebut ada dua yaitu:

- Bagaimana prosedur pemungutan pajak reklame dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah kabupaten banyuasin
- Hambatan-hambatan dalam prosedur pemungutan pajak reklame dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah kabupaten banyuasin. tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak reklame dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah kabupaten banyuasin. serta mengetahui hambatan-hambatan dalam prosedur pemungutan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah kabupaten banyuasin.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

B. Landasan Teori

1. Pajak

a. Definisi Pajak

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang di sebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (UU No. 28 tahun 2009 pasal 1 angka 1)

- 1) Pajak bersifat memaksa
- 2) Pajak berdasarkan Undang-Undang
- 3) Pajak tidak memberikan imbalan (kontra-prestasi) secara langsung
- 4) Pajak merupakan pemungutan yang dilakukan oleh Negara baik Pemerintah pusat maupun Daerah (namun bukan dipungut oleh swasta)

- 5) Pajak digunakan untuk pengeluaran Negara bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat atau masyarakat umum.

b. Fungsi Pajak

Harry (2010 : 8-10) menyatakan bahwa fungsi pajak terdiri dari:

- 1) *Revenue* (Penerimaan), Fungsi penerimaan atau dikenal pula dengan istilah Fungsi *Budgetair* yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.
- 2) *Redistribution* (Pemerataan), yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsure pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.
- 3) *Repricing* (Pengaturan Harga), fungsi ini sama dengan fungsi *regulerent* (mengatur) atau mencapai tujuan tertentu dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
- 4) *Representation* (Legalitas Pemerintahan), fungsi ini mengimplikasikan bahwa pemerintah demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud gotong royong termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.

c. Sistem perpajakan dan sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak Harry (2010 : 12-13) yakni:

- 1) *Official Assessment System*

Official Assessment System yakni system pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.

2) *Self Assessment System*

Self Assessment System yakni suatu system pemungutan pajak yang member wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.

3) *Witholding Tax System*

Witholding Tax System suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang. System ini adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, 24, 25 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

d. Tarif Pajak

Ada empat macam tarif pajak yaitu:

1) Tarif Sebanding/proporsional

Yaitu tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Semakin besar dasar pengenaan pajak

maka semakin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding

2) Tarif progresif/meningkat

Yaitu tarif berupa persentase yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

3) Tarif Tetap

Yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap.

4) Tarif Degresif

Yaitu persentase tariff yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2. Potensi

a. Definisi potensi

Sunarto (2002:64) potensi adalah kemampuan melaksanakan suatu pekerjaan dengan hasil yang memuaskan baik berupa barang atau jasa merupakan kebutuhan masyarakat.

Dikaitkan dengan Pendapatan Asli Daerah maka potensi adalah suatu kesanggupan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan di daerah dalam pencapaian tujuan Negara. Kesanggupan yang dimaksud yaitu kemampuan sumber daya yang

Kesanggupan yang dimaksud yaitu kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh daerah, atau dapat pula diartikan sebagai kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah. Serta dapat pula diartikan sebagai kemampuan atau kesanggupan daerah untuk menghasilkan dana dalam keadaan seratus persen berdasarkan sumber daya yang ada. Dimana potensi yang diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang berguna bagi daerah yang ditujukan untuk peningkatan kemajuan pembangunan daerah.

b. Mengukur Potensi

Analisis pajak reklame ini, dimaksud untuk mengukur atau menghitung besarnya Potensi Pajak Reklame, peraturan daerah Kabupaten OKI nomor 14 tahun 2010, rumus yang digunakan adalah:

Potensi Pajak Reklame

$$\text{Potensi pajak Reklame} = \text{Tarif sewa reklame} \times \text{Letak Strategis} \times \text{Tarif pajak reklame (25\%)} \times (P \times L) \times \text{Lama pemasangan (Jumlah hari/tahun)}$$

Kabupaten OKI pada dasarnya cukup memberi kontribusi terhadap realisasi penerimaan pajak reklame. Selain itu jika dilihat dari keramaian Kabupaten OKI, maka seharusnya pajak reklame dapat merupakan suatu Pajak yang memberi kontribusi yang besar bagi

Kabupaten OKI. Namun kenyataan yang ada berbeda dari yang seharusnya.

Karena belum dikelola secara optimal baik dari perhitungan potensial yang dimiliki, pelaksanaan pemungutan serta pengawasan terhadap pemungutan pajak reklame itu sendiri maka pendapatan dan penerimaan yang diperoleh kurang sesuai dengan potensi yang ada.

c. Perhitungan Potensi

Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi terdepan sehingga akan dapat diperkirakan rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terdepan tersebut untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang.

Ketika didapatkan perhitungan mengenai potensi maka dapat pula diketahui seberapa besar efektivita pengelolaan pajak reklame tersebut karena efektifitas pengelolaan pajak reklame dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah realisasi penerimaan pajak reklame dengan potensi pajak reklame yang ada.

Angka efektifitas ini menunjukkan kemampuan memungut dan mengukur apakah tujuan aktifitas pemungutan dapat dicapai. Dengan demikian semakin besar efektifitas menunjukkan semakin efektif aktivitas pemungutannya. Artinya semakin besar kemampuan memungutnya dan tujuan aktivitas pemungutan semakin mendekati untuk dicapai.

3. Pajak Daerah

a. Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan undang-undang nomor 34 tahun 2000 pasal 2 (1) jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota terdiri dari:

1) Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak pungutan daerah atas pelayanan hotel. Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran hotel. Subjek pajak hotel adalah pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.

2) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan pungutan bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang

disediakan oleh restoran dengan pembayaran, dimana meliputi : penjualan makanan dan minuman yang baik yang disertakan dengan fasilitas tempat menyantap maupun tidak disertai dengan fasilitas tempat penyantapan, kecuali jasa boga dan catering. Subjek pajak restoran adalah orang atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran, kecuali dari objek pajak restoran adalah pelayanan jasa dan boga catering. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran, diharapkan pengusaha restoran yang mempunyai daya cakupan luas dapat membayar pajak restoran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak daerah atau pajak atas penyelenggaraan hiburan, yang merupakan objek pajak hiburan adalah semua yang menyelenggarakan hiburan. Diharapkan pengusaha hiburan yang mempunyai adanya cakupan yang luas dapat membayar pajak hiburan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4) Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame adalah semua yang menyelenggarakan

reklame meliputi: reklame suara, stiker, reklame selebaran, reklame papan dan reklame film.

5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik diwilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak penerangan jalan adalah orang atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan pengguna tenaga listrik.

6) Pajak Penggunaan Bahan Galian Golongan C

Pajak pengelolaan bahan galian golongan c adalah pajak yang dipungut atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan c, maksud eksploitasi adalah pengantian dan pengolahan bahan galian golongan c dari sumber alam, di dalam dan diluar permukaan alam untuk dimanfaatkan. Objek pajak pengolahan bahan galian golongan c adalah asbes, pasir, kerikil, pasir kuarsa, tanah liat, tawas dan lain-lain. Wajib pajak pengolahan

bahan galian golongan c adalah orang atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi bahan galian golongan c. dasar pengenaan pajak pengolahan bahan galian golongan c adalah nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan c.

7) Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh pribadi atau badan, abik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan kendaraan bermobil yang dipungut bayaran. Subjek pajak parkir adalah orang atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir.

Undang-undang nomor 34 tahun tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam pasal 3 ayt (2) dan ayat (3) disebutkan bahwa : besarnya tarif pajak daerah untuk jenis pajak propinsi ditetapkan secara seragam diseluruh Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah. Tarif pajak daerah atau jenis pajak kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah.

Selanjutnya pada penjelasan ayat (2) dan ayat (3) disebutkan bahwa: penetapan tarif yang sama untuk jenis pajak propinsi dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya bersifat netral terhadap wajib pajak, sehingga dapat dihindarkan praktek pemanfaatan tarif pajak yang

lebih rendah pada daerah tertentu. Dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah kabupaten atau kota tarif pajak kabupaten/kota dapat ditetapkan tidak seragam. Hal ini antara lain dengan mempertimbangkan bahwa tarif yang berbeda untuk jenis-jenis pajak tersebut tidak akan mempengaruhi pilihan lokasi wajib pajak untuk melakukan kegiatan yang dikenakan pajak.

b. Unsur-unsur Pajak Daerah

Unsur-unsur pajak daerah menurut undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang dipaparkan oleh Halim (2000:67) menjelaskan bahwa pajak daerah dapat dibedakan kedalam pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota.

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air dibawah tanah atau permukaan

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak hiburan
- 3) Pajak restoran
- 4) Pajak reklame

- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak pengolahan bahan bakau golongan c
- 7) Pajak parkir

3. Kontribusi Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah pemerintah daerah yang perlu ditingkatkan kontribusinya. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah merupakan hubungan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Mengukur kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah dapat digunakan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

4. Pajak Reklame

a. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Reklame

Peraturan daerah nomor 8 tahun 2004 tentang objek, subjek dan wajib pajak reklame, disebutkan bahwa objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Subjek pajak reklame adalah pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame dan wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Marihot (2006:326) penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek pajak reklame adalah sebagai berikut:

- 1) Reklame papan yaitu reklame yang tersebut dari papan, kayu termasuk seng, atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar maupun disisnari.
- 2) Reklame kain yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastic, karet, atau bahan yang sejenis dengan itu.
- 3) Reklame melekat (stiker) yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak melebihi.
- 4) Reklame selebaran, yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempatkan, diletakkan dipasang atau digunakan pada suatu benda lain.
- 5) Reklame berjalan yaitu reklame yang ditempatkan atau ditempatkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.

- 6) Reklame udara yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
- 7) Reklame suara yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suatu suara yang ditimbulkan dari perantara alat.
- 8) Reklame film atau slide yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca film, maupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada diruangan.
- 9) Reklame paragon yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang atau tanpa disertai suara.

b. Tarif Pajak reklame

Peraturan daerah nomor 22 tahun 2010 tentang pajak reklame dinyatakan bahwa tarif pajak reklame sebesar 25%. Tarif pajak tersebut ditetapkan dalam peraturan daerah.

c. Prosedur Pemungutan Pajak Daerah

Prosedur pemungutan pajak daerah ditetapkan oleh peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah. Menurut peraturan daerah nomor 10 tahun 2005 tentang prosedur pemungutan pajak daerah, dalam pasal 75 dan 76 disebutkan bahwa tata cara pelaksanaan pemungutan pajak ditetapkan oleh kepala

daerah. Dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi 5%.

d. Tata cara Pemungutan atau Pelaksanaan Pajak Reklame

1) Pelaksanaan pemungutan pajak reklame

Pelaksanaan pemungutan pajak reklame dilakukan oleh petugas pajak diperiksa oleh dinas pendapatan daerah untuk melakukan rekapitulasi dari seluruh data yang diperoleh.

2) Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame sebagaimana dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategi, lokasi dan jenis reklame. Dalam hal ini reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang dimanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.

Beberapa upaya untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sector pajak reklame yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak sebagai sumber iuran dana kas.
- 2) Menekankan terjadinya oenyelundupan oleh wajib pajak.

- 3) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakan.

Undang-undang nomor 34 tahun 2000 pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dan retribusi daerah dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa : tata cara pengenaan pajak yaitu: cara pertama pajak dibayar oleh pajak terlebih dahulu yang ditetapkan oleh kepala daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Cara kedua pajak dibayar sendiri oleh pajak, pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Mudrajad (2009 : 12) jenis penelitian dikelompokkan menjadi:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lainnya.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian Komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian Asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hambatan-hambatan rendahnya persentase realisasi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah.

B. Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi unit penelitian adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (PPKAD) Kabupaten OKI yang beralamat di Jalan Letnan Dharma Jambi161 Kelurahan Sukadana Kayuagung OKI Telp. 071131278.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mengeksplisitkan bagaimana variabel tersebut diukur. Operasional variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Potensi pajak reklame	Jika dikaitkan dengan Pendapatan Asli Daerah maka potensi adalah suatu kesanggupan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan di daerah dalam pencapaian tujuan Negara. Kesanggupan yang dimaksudkan yaitu kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh daerah.	a.Tarif sewa reklame b.Tarif pajak reklame (25%) c.Letak Strategis d.(P XL) e.Lama Pemasangan
Kontribusi Pajak Reklame terhadap	Sumbangan yang diperoleh dari penerimaan pajak	a.Realisasi pajak reklame tahun anggaran 2010-

penerimaan pajak daerah	daerah, retribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	2013. b.Pendapatan Daerah	Asli
-------------------------	---	------------------------------	------

Sumber: Penulis 2014

D. Data Yang Diperlukan

Muddrajad (2009:148-157) menyebutkan bahwa, sumber data penelitian terdiri dari:

1. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (tidak melalui perantara).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder sebagai sumber data yang berhubungan dengan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini yang terdiri dari laporan realisasi Penerimaan Pajak Asli Daerah (PAD) tahun 2009-2013.

E. Teknik Pengumpulan Data

Suharsimi (2010:256-274) teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui lima metode sebagai berikut:

E. Teknik Pengumpulan Data

Suharsimi (2010:256-274) teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui lima metode sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur terstandar.

2. Survei

Survei adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrument untuk meminta tanggapan responden tentang sampel.

3. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.

4. Kuisisioner (Angket)

Kuisisioner (Angket) yaitu cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, dengan harapan mereka akan member respn terhadap daftar pertanyaan tersebut.

5. Dokumen

Dokumen adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan secara langsung kepada pihak yang berwenang yang dianggap dapat memberikan

dan teori yang berhubungan dengan penelitian ini berupa data-data, sejarah singkat perusahaan, struktur dan pembagian tugas serta aktivitas perusahaan.

F. Analisis dan Teknik Analisis

M.Iqbal (2002:32) ada dua metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data yaitu:

1. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yaitu metode analisis data dimana data-datanya dinyatakan bukan dalam bentuk angka.

2. Analisis Kuantitatif

Analisis Kuantitatif yaitu metode analisis data dimana data-datanya dinyatakan dalam bentuk bilangan angka yang dapat diukur dengan rumus.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data dan menjelaskan bagaimana potensi pemungutan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang terhadap penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, serta menghitung kontribusi penerimaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran umum Dinas PPKAD OKI

Berdasarkan Perda Nomor 4 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten OKI, maka dibentuklah Dinas PPKAD yang merupakan penggabungan Dinas Pendapatan Daerah dan Bagian Keuangan, sebagai tindak lanjut dari pada Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 16 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas PPKAD Kabupaten OKI yang merupakan unsure peraturan Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Adapun tujuan dari Dinas PPKAD adalah:

- Akseptabilitas, dapat diterima oleh seluruh jajaran pengelola pendapatan, keuangan dan asset daerah.
- Fleksibilitas, mudah disesuaikan dengan tuntutan perubahan
- Dapat diukur
- Pendorong kinerja
- Kesesuaian dengan visi dan misi
- Mudah dipahami

2. Fungsi dan Tugas Pokok Dinas PPKAD Kabupaten OKI

Fungsi Dinas PPKAD yaitu :

- a. Pengelolaan urusan umum, keuangan dan perencanaan.
- b. Perumusan kebijakan dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- c. Penyelenggara urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah.
- e. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan penguasaan teknis dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Visi dan Misi PPKAD

Adapun visi dari Dinas ini adalah menuju pelayan prima dalam menggali pendapatan daerah, mengelola keuangan daerah dan asset daerah tahun 2014.

Adapun misi dari Dinas ini adalah:

- Tepat dalam pelunasan pajak dan retribusi daerah.
- Efisien dalam pengelolaan keuangan daerah.
- Efektif pemanfaatan asset daerah.

4. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Dinas PPKAD

Untuk menjalankan tugas yang dibebankan kepada Dinas PPKAD, maka Dinas PPKAD Kabupaten OKI mempunyai struktur organisasi sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 6 Tahun 2010, yaitu:

a. Kepala Dinas

1) Kepala Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.

2) Fungsi Kepala Dinas

- a) Pengelolaan Urusan Perencanaan, Keuangan, Umum dan kepegawaian.
- b) Penyusunan rumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan dibidang Pendapatan Daerah.
- c) Penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah APBD dan APBD perubahan.
- d) Penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis pengelolaan, pengumpulan dalam penyusunan rencana pengadaan, pemeliharaan dan pengamanan asset daerah.

- e) Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelolah, menelaah serta menyusun kebijakan teknis dan program dibidang Pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.
- f) Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna melaksanakan pengawasan teknis dan pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- g) Penelitian dan pengembangan yang meliputi segala kegiatan usaha untuk menyelenggarakan, menggali, meneliti dan mengembangkan serta menumbuhkan hubungan untuk melaksanakan dan meningkatkan tugas dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset Negara.

b. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu:

- 1) Bagian sekretaris dalam pelaksanaan kegiatan teknis administrasi umum, perlengkapan dan peralatan, penataan arsip, kepegawaian dan penatausahaan keuangan SKPD (DPPKAD).
- 2) Mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan anggaran RKA SKPD.
- 3) Mengkoordinir penyusunan DPA SKPD
- 4) Mengkoordinir penyusunan kebutuhan anggaran kas SKPD.

- 5) Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas.
- 6) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang masing-masing agar memahami tugasnya.
- 7) Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar.
- 8) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi.
- 9) Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karir.
- 10) Mengatur pendistribusian surat masuk dan surat keluar sesuai permasalahan agar penyampaian ketempat tujuan tepat waktu.
- 11) Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan administrasi ketatausahaan sesuai kebutuhan unit kerja agar kegiatan pokok dapat terlaksana dengan lancar.
- 12) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan perencanaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan hukum sesuai dengan kebutuhan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- 13) Mengkoordinir penyusunan program kerja dinas SKPD berdasarkan masukan dari satuan kinerja agar tercapai sasaran yang telah ditentukan.

- 14) Mengkoordinir pemberian pelayanan administrasi kepada seluruh satuan unit kerja sesuai permasalahannya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.
- 15) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan melalui pemantauan dan monitoring sesuai program yang telah ditetapkan untuk mengetahui hambatan dan kendala yang terjadi.
- 16) Memimpin membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.

Sekretaris Dinas terdiri dari 3 kepala sub bagian, yaitu:

- 1) Kepala sub bagian umum dan kepegawaian yang mempunyai tugas:
 - a) Menyusun rencana kegiatan dan program kerja sub bag umum dan kepegawaian.
 - b) Menyelenggarakan pelayan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan perpustakaan.
 - c) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait baik internal maupun eksternal (Badan Kepegawaian Daerah)
 - d) Menginventarisir pengadaan, mengelola dan memelihara serta pengamanan alat-alat perlengkapan dan perpustakaan.
 - e) Mengatur pendistribusian surat masuk dan keluar sesuai permasalahannya agar penyampaian tujuan tepat waktu.

- f) Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan administrasi ketatausahaan dan perjalanan dinas sesuai kebutuhan agar kegiatan dapat berjalan lancar.
 - g) Mengkoordinir kegiatan pelayanan kerumah tanggan dan keprotokolan sesuai rencana kebutuhan masing-masing unit untuk mendukung pelaksanaan tugas.
 - h) Mengumpulkan dan mengolah data yang berhubungan dengan bidang kepegawaian.
 - i) Menyiapkan dan mengolah data yang berhubungan dengan bidang kepegawaian.
 - j) Menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas.
 - k) Menyiapkan data dan bahan perlengkapan untuk pengusulan dan pengangkatan dalam jabatan.
 - l) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - m) Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karir.
 - n) Memberi saran dan pendapat pada atasan
 - o) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin.
- 2) Kepala Sub Bagian Keuangan
- a) Menghimpun dan menyiapkan bahan untuk keperluan anggaran belanja rutin dan kegiatan kantor.
 - b) Mengatur pelaksanaan dan penggunaan anggaran.

- c) Meneliti kelengkapan spp yang disimpulkan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
- d) Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang di ajukan oleh bendahara pengeluaran.
- e) Melakukan verivikasi.
- f) Menyiapkan SPM.
- g) Melakukan verivikasi harian atas penerimaan SKPD.
- h) Melaksanakan akuntansi SKPD dan menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- i) Mengusulkan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas bendaharawan dan daftar gaji.
- j) Menyiapkan dan melaksanakan biaya kontribusi bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikn dan pelatihan.
- k) Memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan dibidang tugasnya.
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya.

3) Kepala Sub Bagian Perencanaan

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:

- a) Menyusun program kegiatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah baik program jangka pendek, menengah dan panjang.
- b) Menyiapkan rencana anggaran beserta perubahannya sesuai dengan kebutuhan.
- c) Mengusulkan pimpinan kegiatan dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan.
- d) Bersama sub bagian keuangan menyiapkan data dan laporan realisasi anggaran sesuai rencana dan program kerja secara berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang menangani perencanaan dan keuangan.
- e) Memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan dibidang tugasnya.
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya.

c. Kepala Bidang Pendapatan Daerah

Kepala Bidang Pendapatan Daerah mempunyai tugas yaitu:

- a) Melakukan pendaftaran /pendataan, penetapan dan penagihan yang berhubungan dengan pajak dan retribusi daerah.
- b) Melaksanakan kegiatan koordinasi dan pengelolaan pendapatan daerah dari PAD, dana perimbangan dari pemerintah pusat dan

pemerintah provinsi yang mencakup bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan pendapatan lain-lain.

- c) Membuat prakiraan / asumsi rencana penerimaan pendapatan daerah dan mengevaluasi penerimaan pendapatan daerah.
- d) Menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah.
- e) Meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendaptan daerah.
- f) Melakukan penyuluhan pajak dan retribusi daerah dan pajak-pajak lainnya.
- g) Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Fungsi Kepala Bidang Pendapatan Daerah, yaitu:

- a) Menyelenggarakan kegiatan pendaftaran dan pendataan serta penetapan objek dan subjek pajak daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan kewenangannya.
- b) Menyelenggarakan tugas penagihan pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lain sesuai dengan kewenangannya.
- c) Menyelenggarakan tugas penyuluhan dan pembinaan terhadap penerimaan pajak daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan kewenangannya.

- d) Menyelenggarakan kegiatan penghimpunan data dan informasi pajak dan retribusi serta pendapatan lainnya.

Kepala Bidang Pendapatan Daerah terdiri dari 3 kepala seksi, yaitu:

- 1) Kepala seksi pendaftaran dan penetapan

Kepala seksi pendaftaran dan penetapan mempunyai tugas, yaitu:

- a) Melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah.
- b) Melakukan proses penetapan pajak dan retribusi daerah berdasarkan ketentuan dan system serta prosedur yang berlaku.
- c) Melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap subjek dan objek pajak daerah.
- d) Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
- e) Menerbitkan kartu data wajib pajak / retribusi daerah.
- f) Melaksanakan penetapan secara jabatan pajak dan retribusi daerah.
- g) Melaporkan hasil penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
- h) Menyelenggarakan pengawasan terhadap penyediaan penggunaan benda berharga yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah.
- i) Menerima dan melayani surat permohonan banding serta mengumpulkan data dan mengelola data sumber penerimaan

daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

j) Melaksanakan tugas-tugas yang telah diserahkan atasan.

2) Kepala seksi Penagihan

Kepala seksi penagihan mempunyai tugas yaitu:

- a) Menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan.
- b) Melaksanakan kegiatan penagihan ke wajib pajak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c) Membuat laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah.
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh atasan.

3) Kepala Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya

Kepala seksi dana dan perimbangan dan pendapatan lainnya mempunyai tugas yaitu:

- a) Melakukan pemantauan penerimaan pendapatan daerah berupa pajak, retribusi dan pendapatan lainnya.
- b) Menyelenggarakan kegiatan penghimpunan data dan informasi Dana Bagi Hasil serta Dana Perimbangan.
- c) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan perimbangan keuangan.

- d) Menyusun rencana pendapatan dari dana perimbangan
- e) Pengelolaan proses penerimaan dana dan perimbangan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
- f) Melaksanakan kegiatan pengelolaan perimbangan keuangan yang bersumber dari pendapatan lain-lain di luar pajak dan bukan pajak.
- g) Melakukan koordinasi ke dinas-dinas tentang penerimaan pendapatan daerah.
- h) Melakukan penerimaan dana bagi hasil dan dana perimbangan disetiap memberikan SKPD penerima
- i) Melakukan rekonsiliasi realisasi dana perimbangan dengan satuan kerja terkait.
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

d. Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas yaitu:

- a) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja di bidang sub bidang belanja pegawai.
- b) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang

berhubungan dengan penganggaran perbendaharaan dan belanja pegawai.

- c) Menyusun rencana operasional kerja bidang anggaran berdasarkan program dan sasaran dari masing-masing unit pengelola yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- d) Melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran dan perubahan APBD.
- e) Penyiapan badan pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan APBD serta pengesahannya.
- f) Penyiapan bahan pengesahan APBD.
- g) Penyiapan rencana dan rancangan peraturan daerah pembentukan dana cadangan, pinjaman daerah/hutang, penyertaan modal/investasi dan pemberian pinjaman daerah.
- h) Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan.
- i) Membuat penyusunan perkiraan belanja keuangan daerah.

Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan terdiri dari 2 kepala seksi, yaitu:

- 1) Kepala Seksi Anggaran
 - a) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penganggaran.

- b) Menyusun rencana kegiatan program kerja Sub Bidang Anggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- c) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan APBD.
- d) Menghimpun dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana perubahan APBD.
- e) Mengolah data serta informasi yang berkaitan dengan bidang anggaran.
- f) Memberikan petunjuk teknis perancangan bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
- g) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- h) Menerima dan mengolah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dilingkungan pemerintah daerah.
- i) Menerima dan mengolah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran Lanjutan (DPAL) SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah.
- j) Menganalisis rencana anggaran belanja daerah.
- k) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan berkala tentang perkembangan penyusunan APBD.

2) Kepala Seksi Perbendaharaan

Kepala Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas yaitu:

- a) Menyiapkan SPD (Surat Pencarian Dana), menyiapkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
- b) Meneliti kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM), menetapkan penerbitan dan surat penolakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyusun serta mengelola DPA-PPKD.
- c) Menguji kebenaran SPM dari setiap SKPD.
- d) Menerima, menyiapkan dan membayar uang daerah sebagai fungsi kas daerah.
- e) Menyiapkan anggaran kas, menyusun laporan arus kas memantau pelaksana APBD.
- f) Menunjukkan Bank Operasional untuk melakukan penerimaan dan pembayaran kas sebagai salah satu fungsi kas daerah.
- g) Menyusun Anggaran Belanja Pegawai pada Belanja tidak langsung SKPD dalam kabupaten OKI.
- h) Membuat SSBD (Surat Setoran Bukan Pajak) belanja pegawai pada Belanja Tidak Langsung.
- i) Melakukan tugas lain yang diberikan atasan.

e. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Kepala bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas, yaitu:

- a) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja bidang akuntansi.
- b) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah.
- c) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah maupun akuntansi SKPD.
- d) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- e) Melakukan verifikasi atas SP2D yang telah terbit apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f) Melaksanakan pembukuan sampai dengan pelaporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
- g) Menghimpun dan mengolah data pengelolaan keuangan daerah.
- h) Penyusunan laporan keuangan.
- i) Menyiapkan laporan keuangan daerah.

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari 3 kepala seksi yaitu:

1) Kepala Seksi Verifikasi dan Pembukuan

Kepala Seksi Verifikasi dan Pembukuan mempunyai tugas yaitu:

- a) Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran.

- b) Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan.
- c) Melaksanakan pembukuan akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, asset dan selain kas pada SKPD berdasarkan transaksi dan bukti yang sah.
- d) Melakukan koordinasi dengan satuan kinerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
- e) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2) Kepala Seksi Akuntansi dan Pelaporan

Kepala Seksi Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas yaitu:

- a) Menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan akuntansi pemerintah daerah.
- b) Menyiapkan rancangan Perda tentang kebijakan akuntansi pemerintah Daerah.
- c) Menyiapkan bahan penyesuaian kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah maupun akuntansi SKPS.
- d) Menghimpun dan mengolah dana serta informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan daerah.
- e) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

- f) Melakukan serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas.
- g) Melakukan konsolidasi laporan keuangan SKPKD dengan laporan keuangan SKPD.
- h) Memeriksa dan menghimpun laporan realisasi anggaran setiap satuan kerja.
- i) Melaksanakan penyusunan laporan arus kas secara periodik kepada kepala daerah.
- j) Membuat laporan keuangan setiap semester (penyusunan laporan semester).
- k) Menyiapkan laporan keuangan tahunan berkaitan dengan pertanggungjawaban kepala daerah terhadap pelaksanaan APBD.
- l) Menyiapkan rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- m) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

f. Kepala Bidang Aset dan Investasi

Kepala Bidang Aset dan Investasi mempunyai tugas yaitu:

Membantu kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah, menyusun rencana pengembangan melalui perumusan tujuan, sasaran dan

kebijaksanaan yang berhubungan dengan investasi daerah serta evaluasi atas pelaksanaannya, merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan dan pengelolaan barang milik daerah serta investasi daerah.

Fungsi kepala Bidang Aset dan Investasi yaitu:

- a) Menyusun program kerja Bidang aset dan Investasi.
- b) Mengkaji dan menilai barang milik daerah.
- c) Menyimpan dokumen dan memelihara barang milik daerah.
- d) Mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah.
- e) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah.
- f) Menyiapkan bahan untuk koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan investasi dalam dan luar negeri.
- g) Melaksanakan pembinaan administrasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terdiri dari perusahaan daerah, bank pembangunan daerah, dan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP).
- h) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program Bidang Aset dan Investasi.

Kepala Bidang Aset dan Investasi terdiri dari 3 kepala seksi yaitu:

- 1) Kepala Seksi Analisa Kebutuhan dan Investasi Daerah

Kepala Seksi Analisis Kebutuhan dan Investasi Daerah mempunyai tugas yaitu:

- a) Menyusun standarisasi barang, standarisasi harga barang dan standarisasi kebutuhan barang daerah.

- b) Menghimpun dan menganalisis usulan dan rencana kebutuhan barang SKPD dan rencana kebutuhan pemeliharaan SKPD.
- c) Menyusun rencana daftar kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan Barang Milik Negara.
- d) Menyusun rencana pengembangan investasi daerah.
- e) Melakukan proses dalam rangka pelaksanaan investasi daerah.
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan yang sesuai dengan tugasnya.

2) Kepala Seksi Pengelolaan aset Daerah

Kepala Seksi Pengelolaan aset Daerah mempunyai tugas yaitu:

- a) Memproses dan mengusulkan penunjukan pengurus / penyimpanan barang barang pada tiap SKPD.
- b) Menganalisa dan melakukan proses administrasi usulan penggunaan barang milik daerah.
- c) Menganalisa dan melakukan proses administrasi dan penghapusan asset daerah.
- d) Menganalisa dan melakukan proses perubahan status hokum barang milik daerah.
- e) Menyusun rencana pemanfaatan barang-barang milik daerah.
- f) Menganalisa dan melakukan proses pemanfaatan barang milik daerah.
- g) Melakukan monitoring proses pengelolaan aset daerah.

h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

3) Kepala Seksi Investarisasi dan Pengendalian aset Daerah

Kepala Seksi Investarisasi dan pengendalian aset daerah mempunyai tugas yaitu:

- a) Mendata, mencatat dan menyusun laporan investarisasi daerah.
- b) Melakukan penatausahaan barang milik daerah.
- c) Menyiapkan laporan yang berkenaan dengan penatausahaan dan penilaian barang daerah.
- d) Melakukan administrasi penyimpanan barang pada tiap SKPD.
- e) Melakukan pengamanan, pemeliharaan dan melengkapi dokumen/bukti sah kepemilikan barang milik daerah.
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

g. Kepala Bidang PBB dan BPHTB

Kepala Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas yaitu:

- a) Melakukan pendataan dan pengukuran objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- b) Membuat prakiraan/asumsi rencana penerimaan PBB dan BPHTB.
- c) Melakukan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan.

- d) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB

Fungsi Kepala Bidang PBB dan BPHTB yaitu:

- a) Pengelolaan penerimaan Pajak Bumi (PBB) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- b) Melaksanakan Pembina kepada masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- c) Menyelenggarakan kegiatan pendaftaran dan pendataan subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- d) Menyelenggarakan tugas penyuluhan dan pembinaan terhadap wajib PBB.
- e) Menerima laporan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan penerimaan BPHTB.

Kepala Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari 3 kepala seksi yaitu:

- 1) Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Kepala seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas yaitu:

- a) Melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib Pajak Bumi dan Bangunan.
- b) Melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap subjek dan objek PBB.
- c) Melaksanakan dan menerima proses penyelenggaraan BPHTB.

- d) Menerima laporan keberatan pengurangan dan penghapusan dari wajib pajak terhadap objek pajak bumi dan bangunan.
- e) Meneliti dan memproses laporan wajib pajak bumi bangunan terhadap keberatan, pengurangan maupun penghapusan wajib pajak atau objek PBB.
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Penetapan

Kepala Seksi Pengolahan Data dan Penetapan mempunyai tugas yaitu:

- a) Melaksanakan pengolahan data PBB dan BPHTB
- b) Menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan mengevaluasi setiap 3 tahun sekali kecuali objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
- c) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB kepada Wajib Pajak.
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3) Kepala Seksi Eksistensifikasi dan Pengawasan

Kepala Seksi Eksistensifikasi dan pengawasan mempunyai tugas yaitu:

- a) Menerima laporan keberatan, pengurangan dan penghapusan dari wajib pajak terhadap objek pajak bumi dan bangunan.
- b) Meneliti laporan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pengurangan maupun penghapusan wajib pajak dan atau objek PBB.
- c) Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian data wajib pajak bumi dan bangunan.
- d) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan PBB dan BPHTB.
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Bab ini akan membahas permasalahan yang di ajukan pada bagian pendahuluan yaitu bagaimana potensi pajak reklame dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah Kabupaten OKI.

Analisis potensi pajak reklame dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten OKI dengan cara mengefektifkan dan mengefesienkan potensi pemungutan pajak reklame dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah Kabupaten OKI.

Sehubungan uraian terdahulu pada sub bab ini peneliti akan mencoba menganalisis potensi pemungutan pajak reklame dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten OKI.

1. Analisis Potensi Pajak Reklame di Kabupaten OKI

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa fenomena yang ada dalam pemungutan pajak reklame di Kabupaten OKI yaitu kurangnya pemahaman wajib pajak dan penetapan pajak reklame yang terutang. Berdasarkan hal tersebut, maka pada bagian ini peneliti akan membahas mengenai potensi pajak reklame dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah Kabupaten OKI.

Potensi pajak reklame merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak, pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak terutang dan pembayaran pajak reklame. Pelaksanaan pemungutan pajak reklame Kabupaten OKI dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame dalam wilayah Kabupaten OKI akan dipungut pajak reklame oleh Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas pendapatan daerah ditetapkan sebagai unit kerja yang melaksanakan proses penelitian administrasi dan penelitian teknis dalam rangka pemungutan pajak reklame

a. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame

Pelaksanaan pemungutan pajak reklame dilakukan oleh sub Dinas Pendapatan Daerah dan Penetapan Kabupaten OKI. Kegiatan data dimulai dengan mendata lokasi pemasangan reklame. Setelah melakukan pendataan selanjutnya sub Dinas Pendapatan dan Penetapan melakukan pendaftaran dan menentukan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Untuk mendapatkan NPWPD wajib pajak mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKI. Apabila Wajib Pajak tidak membayar atau kurang bayar akan dikenakan sanksi berupa 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang terutang atau kurang bayar dan ditagih menggunakan SPTD.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame ada fungsi yang berperan penting di dalamnya yakni Pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting. Pengawasan dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak adanya penyimpangan atau penyalahgunaan dan kebocoran keuangan.

Tanpa pengawasan maka jalannya pengawasan suatu organisasi tidak dapat dinilai apakah sesuai dengan rencana organisasi atau telah menyimpang dari arah yang telah ditetapkan. Untuk itu pengawasan perlu untuk dilakukan setiap pelaksanaan suatu kegiatan.

Dalam penelitian ini pelaksanaan pemungutan pajak reklame adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan asset Daerah Kabupaten OKI, dalam hal ini memastikan dan jaminan bahwa tujuan dan tugas-tugas pemungutan pajak reklame dapat terselenggara dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau standar yang ditetapkan.

b. Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa. Nilai sewa reklame sebagaimana di hitung berdasarkan lama pemasangan, nilai strategi, lokasi dan jenis reklame.

c. Upaya peningkatan Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah yang ideal apabila realisasi penerimaan daerah setelah dipotong biaya pemungutan hasilnya tetap melebihi jumlah target yang ditetapkan. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan pemungutan pendataan tersebut efisien atau tidak. Hal itu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata realisasi tidak mencapai target yang ditetapkan.

Adapun upaya untuk peningkatan penerimaan pajak daerah yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

Peningkatan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Kualitas pelayanan di setiap unit kerja menjadi salah satu yang utama untuk di laksanakan, yang diimbangi dengan pengawasan yang efektif dan di dukung oleh sumber daya manusia yang professional. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

- 2) Menekan terjadinya penyelundupan oleh wajib pajak.

Hal yang bisa dilakukan untuk menekan terjadinya penyelundupan oleh wajib pajak yaitu dengan terus melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang belum terdaftar.

- 3) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyelenggarakan pajak tersebut.

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat begitu pula sebaliknya. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan memberi

pembinaan yang bisa dilakukan dengan senantiasa mengingatkan wajib pajak agar menyampaikan pajaknya dengan benar dan tepat waktu serta member tindakan tegas dan konsisten menerapkan sanksi atas keterlambatan wajib pajak.

2. Analisis Efektifitas Pajak Reklame

Efektifitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkatan output tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektifitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat merupakan sasaran yang telah ditentukan. Efektifitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau potensi riil yang telah dimiliki suatu daerah. Efektifitas adalah pencapaian sasaran menurut perhitungan terbaik mengenai sasaran suasana dagang dan kemungkinan dari pada laba.

Untuk menghitung efektifitas pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKI digunakan rumus:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Target Penerimaan Pajak Reklame}} \times 100\%$$

Dengan kriteria Penilaian sebagai berikut:

Tabel VI.1
Persentase Efektifitas

Persentase Efektifitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 99,99%	Efektif
80% - 89,99%	Cukup Efektif
60% -79%	Kurang Efektif
<59,99%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri 2014

Dengan Pengertian efektifitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan efektif. selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektifitas, ukuran efektifitasnya biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja.

a. Nilai Efektifitas Pajak Reklame

1. Efektifitas Pajak Reklame tahun 2010

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas} &= \frac{216.971.000}{242.383.000} \times 100\% \\ &= 89.51\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat bahwa efektifitas pajak reklame di kabupaten OKI cukup efektif sebesar 89.51%.

2. Tahun Pajak Reklame tahun 2011

$$\begin{aligned}\text{Efektifitas} &= \frac{\text{Rp. 274.047.950}}{\text{Rp. 290.000.000}} \times 100\% \\ &= 94.49\%\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat bahwa efektifitas pajak reklame di kabupaten OKI efektif sebesar 94.49%

3. Efektifitas Pajak Reklame Tahun 2012

$$\begin{aligned}\text{Efektifitas} &= \frac{\text{Rp. 355.878.500}}{\text{Rp. 360.000.000}} \times 100\% \\ &= 98.85\%\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat efektifitas pajak reklame di kabupaten OKI efektif sebesar 98.85%

4. Efektifitas Pajak Reklame Tahun 2013

$$\begin{aligned}\text{Efektifitas} &= \frac{\text{Rp. 362.011.100}}{\text{Rp. 394.799.750}} \times 100\% \\ &= 91.69\%\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat efektifitas pajak reklame di kabupaten OKI efektif sebesar 91.69%

Dilihat dari efektifitas pajak reklame selama empat tahun berturut-turut dapat dikatakan bahwa potensi pajak reklame yang ditemukan peneliti saat melakukan penelitian hamper mendekati efektif hanya saja belum memenuhi target pajak reklame yang telah ditentukan.

3. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Reklame adalah benda, alat atau media yang menurut corak dan ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan suatu barang, jasa atau orang yang di tempatkan atau dilihat, dibaca, didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Secara umum sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak reklame adalah sistem *self assessment*. Dimana pada sistem *self assessment* wajib pajak diberikan kewenangan dalam menghitung, melaporkan pajak yang terutang, sedangkan *official assessment* dimana kepala daerah menetapkan pajak terutang kepada wajib pajak.

a. Target Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Nilai kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten OKI dari tahun 2009 sampai dengan 2013 adalah sebagai berikut:

Tahun 2010

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Rp. 216.971.000}}{\text{Rp. 29.862.867.212}} \times 100\% \\ &= 0.7\% \end{aligned}$$

Tahun 2011

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Rp. 274.047.950}}{\text{Rp. 47.387.144.367}} \times 100\% \\ &= 0.6\% \end{aligned}$$

Tahun 2012

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Rp. 355.878.500}}{\text{Rp. 54.692.346.473}} \times 100\% \\ &= 0.6\% \end{aligned}$$

Tahun 2013

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Rp. 362.011.100}}{\text{Rp. 68.643.024.166}} \times 100\% \\ &= 0.5\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas bahwa nilai kontribusi pajak reklame yang berasal dari pajak daerah Kabupaten OKI dari tahun 2010-2013 cenderung berfluktuasi yakni tahun 2010 sebesar 0.6% dari pendapatan asli daerah, tahun 2011 sebesar 0.6% dari pendapatan asli daerah, tahun 2012 sebesar 0,6% dari pendapatan asli daerah dan tahun 2013 sebesar 0.5% dari pendapatan asli daerah.

4. Gambaran Perhitungan Potensi Pajak Reklame

a. DIATAS GEDUNG

- 1) Papan merk, panel, baliho, Neon box, Neon Sign, huruf timbul, tin plat, branding, superdesk

$$\begin{aligned} &\text{Rp. 175.000} \times 6,1 \times 25\% \times (\text{PXL}) \times \text{lama} \\ &\text{pemasangan} \\ &= \text{Rp. 266.875} \end{aligned}$$

2) Billboard ukuran 32M ke atas

Rp. 400.000 X 6,1 X 25% X (PXL) X lama
 pemasangan
 = Rp. 610.000

b. DIATAS TANAH

1) Papan merk, tiang pancang, baliho, neon sign, neon box,
rombong, superdesk

Rp. 175.000 X 6,1 X 25% X (PXL) X lama
 pemasangan
 = Rp. 266.875

2) Billboard ukuran 32M ke atas

Rp. 500.000 X 6,1 X 25% X (PXL) X lama
 pemasangan
 = Rp. 762.500

c. DIATAS AIR

1) Reklame Apung (Kendaraan Air)

Rp. 175.000 X 6,1 X 25% X (PXL) X lama
 pemasangan
 = Rp. 266.875

d. REKLAME KAIN

1) Cover Baliho, spanduk, umbul-umbul, layar took (Sun
Screen), gazebo, V.Banner, T.Banner, dll

$$\text{Rp. } 3000 \times 6,1 \times 25\% \times \text{Jumlah} \times (\text{lama pemasangan}) \times (\text{PXL}) = \text{Rp. } 4.575$$

e. SELEBARAN

1) Selebaran Warna

$$\text{Rp. } 1.200 \times 5,5 \times 25\% \times \text{Jumlah} = \text{Rp. } 1.650$$

2) Selebaran Hitam Putih

$$\text{Rp. } 700 \times 5,5 \times 25\% \times \text{jumlah} = \text{Rp. } 963$$

3) Stiker / Poster

$$\text{Rp. } 1.250 \times 5,5 \times 25\% \times \text{Jumlah} = \text{Rp. } 1.719$$

4) Plag Chain

$$\text{Rp. } 1.500 \times 5,5 \times 25\% \times \text{Jumlah} = \text{Rp. } 2.063$$

f. KENDARAAN BERJALAN

Mobil/ Motor/ Kendaraan air bergerak

$$\begin{aligned} &\text{Rp. } 1000 \times 365 \times 5,5 \times 25\% \times (\text{PXL}) \times \text{lama} \\ &\text{pemasangan} \\ &= \text{Rp } 501.875 \end{aligned}$$

g. BALON UDARA

$$\text{Rp. } 3000 \times 5,5 \times 25\% \times / \text{hari} \times \text{Jumlah} = \text{Rp. } 4.125$$

h. REKLAME PERAGAAN

$$\text{Rp. } 2000 \times 5,5 \times 25\% \times / \text{Minggu} = \text{Rp. } 2.750$$

i. REKLAME VIDEOTRON

$$\text{Rp. } 600.000 \times 6,1 \times 25\% \times (\text{PXL}) \times / \text{Bulan} = \text{Rp } 915.000$$

Melihat potensi yang ada maka tepat jika pajak reklame merupakan salah satu pajak daerah yang perlu ditingkatkan pendapatannya mengingat Kabupaten OKI terletak diwilayah yang strategis yakni diperlintasan antara Sumatera dan Lampung, Jawa. Pemasangan reklame tersebut juga dilakukan ditempat-tempat yang ramai dan strategis sehingga dapat menarik perhatian orang-orang yang melihat baik masyarakat setempat maupun orang-orang yang melintasi Kabupaten OKI itu sendiri.

Karena belum dikelola secara optimal baik dari pelaksanaan pemungutan maupun pengawasan terhadap pemungutan pajak reklame itu sendiri maka pendapatan dan penerimaan yang diperoleh masih belum mencapai target dan belum sesuai dengan potensi yang ada.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil pembahasan terhadap permasalahan dalam skripsi ini akan diuraikan kesimpulan mengenai keadaan dan hasil pembahasan terhadap perumusan masalah yang telah dianalisis serta peneliti akan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai usulan perbaikan atau masukan untuk kepentingan pemerintah Kabupaten OKI guna untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Melihat potensi penerimaan dan efektifitas pajak khususnya pajak reklame dapat menunjukkan bahwa untuk pajak reklame di daerah Kabupaten OKI memiliki potensi yang cukup tinggi. Karena memiliki potensi penerimaan yang cukup baik dan efektifitasnya mendekati efektif. Untuk itu perlu usaha dari pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan keberhasilan pajak reklame sehingga penerimaan, pertumbuhan dan kontribusi baik terhadap pajak daerah maupun pendapatan asli daerah dapat di tingkatkan lagi.
2. Kontribusi yang diberikan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKI pada tahun 2010

sebesar 0.7%, pada tahun 2011 sebesar 0.6 %, pada tahun 2012 sebesar 0.6%, pada tahun 2013 sebesar 0.5% .

3. Sistem pemungutan pajak reklame yang digunakan adalah sistem *self assessment* adalah wajib pajak menghitung, mengisi dan menyetor sendiri pajak terutang. *Official assessment* adalah wajib pajak ditetapkan langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut maka diberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan target pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah Kabupaten OKI.

1. Hendaklah lebih ditingkatkan lagi koordinasi dan pengawasan oleh satuan kerja perangkat daerah, dalam hal ini tim penyelenggaraan perijinan reklame terhadap pelaksanaan pemungutan pajak reklame agar tidak terjadi penyimpangan dalam pemungutan dan pelaporan penerimaan pajak reklame. Pemberian saksi yang tegas terhadap pelanggaran pajak reklame akan lebih meningkatkan kedisiplinan terhadap wajib pajak reklame.
2. Melihat penerimaan pajak daerah maka pemerintah diharapkan dapat mengelola pajak daerah dengan terus melakukan pengawasan terhadap wajib pajak dan melakukan penertiban wajib pajak yang belum terdaftar, karena masih banyak wajib pajak reklame yang belum mendaftar dan juga kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam pemasangan reklame.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2002. **Akuntansi Sektor Publik**, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Marihot. 2006. **Perpajakan**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- M. Iqbal Hasan. 2002. **Pokok-pokok Materi Statistik I**, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Mudrajad Kunoro. 2009. **Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi**, Penerbit Aksara Pratama, Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang **Tarif Pajak Reklame..**
- Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2005 tentang **Prosedur Pemungutan Pajak Daerah.**
- Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2010 **tentang Pajak Reklame.**
- Suharsimi Arikunto. 2010. **Prosedur Penelitian**, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang **Persyaratan Mekanisme dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame.**
- Undang-undang Nomor 35 tahun 2004 tentang **Dasar pengenaan dan Tarif Pajak Reklame.**
- Dini Nurmayasari. 2009. **Analisis Penerimaan Pajak Reklame Kota Serang.** Skripsi.
- Lili Syafitri. 2012. **Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Penerimaan asli Daerah Kota jambi.** Jurnal.
- Rini Oktarina. 2007. **Analisis Prosedur Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin.** Skripsi.



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor : 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/1/2014 (B)
Nomor : 044/SK/BAN-PT/Akred/S/1/2014 (B)
Nomor : 044/SK/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011 (B)
Nomor : 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010 (B)

Website: umpalembang.net/feump

Email : feump1g@gmail.com

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 511433 Faximile (0711) 518018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Selasa, 30 Desember 2014
Waktu : 08.00 s/d 12.00
Nama : Intan Prawesti
NIM : 22 2010 211
Program Studi : Akuntansi
Bidang Skripsi : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Tensi Pajak Reklame Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKI

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING
SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Hasyim H, S.E., M.Si	Pembimbing	14 - 01 - 2015	
2	Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si	Ketua Penguji	18 / Jan 2015	
3	Nina Sabrina, S.E., M.Si	Penguji I	13 - 01 - 2015	
4	Lis Djuniar, S.E., M.Si	Penguji II	12 - 01 - 2015	

Palembang, Januari 2014

Dekan
Ketua Program Studi Akuntansi



Rosalina Ghazali, SE.Ak.M.Si
NIDN/NBM : 0228115802/1021961

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Letnan Dharna Jambi No. 161 Kayuagung 30611 Telp. (0711) 321278 Fax (0712) 323893

Kayuagung, Oktober 2014

Kepada Yth,

Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Palembang

di –

Tempat

mor : 870/ /DPPKAD/2014
at : Biasa
mpiran : -
ihal : Izin Penelitian

Berdasarkan Surat Kepala Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 070/02/Bappeda-2014 Tentang Izin Penelitian Di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Ogan nering Ilir, atas nama :

Nama : INTAN PRAWESTI

Pekerjaan : Mahasiswi

Sehubungan dengan maksud di atas yang bersangkutan telah melakukan penelitian tentang “Analisis ensi Pajak Reklame dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten I yang Dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan nering Ilir”

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
PENGELOLO KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KOMERING ILIR
SEKETARIS DAERAH



RUSLAINI. SE

PEMBINA

NIP. 196504161993032004



FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

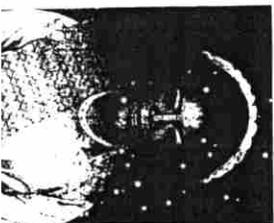
NAMA : INTAN PRAWESTI
NIM : 222010211
JURUSAN : Akuntansi

Yang dinyatakan LULUS Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat MEMUASKAN

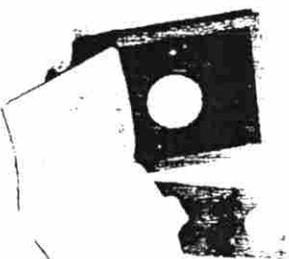
Palembang, 20 Desember 2014

an. Dekan

Wakil Dekan IV



Drs. Antoni, M.H.I.





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

MA MAHASISWA :	Intan Prawesti	PEMBIMBING
M :	22 2010 211	KETUA : Hasyim H. S.E.,M.Si
RUSAN :	Akuntansi	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI :	ANALISIS POTENSI PAJAK REKLAME DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN OKI	

TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	
Jum 12/12/2011	Bab I Perbaiki			
Senin 17/12/2011	Bab II Perbaiki			
Kamis 21/12/2011	Bab III Perbaiki			
Jum 29/12/2011	Bab III & IV Perbaiki			
Kamis 4/1/2012	Bab IV & V			Perbaiki
Jumat 12/1/2012	Bab IV & V			Perbaiki
Kamis 18/1/2012	Bab IV & V			Perbaiki
Jumat 19/1/2012	Bab IV & V			Perbaiki
				Perbaiki

TATAN

siswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, ulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Di keluaran di : Palembang
 Pada tanggal : / /
 a.n. Dekan
 Ketua Jurusan

 Rosdina Ghazali, S.Pd., Ak.,M.Si

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 STATUS DISAMAKAN / TERAKREDITASI
 LABORATORIUM BAHASA
 Jl. Jend. A. Yani 13 Ulu Palembang
 Telp. (0711) 510942

This is to certify that
TEST ONE SEMESTER STABILITY
 DOB: Palembang, January 10, 1992 / Once taken: +2
 Has already taken Test of English Ability administered by

"Laboratorium Bahasa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang".
 The test was held on December 13th, 2014. The estimated test score is shown in the following table.

Score	Section 1	Section 2	Section 3	Total Score
	Listening Comprehension	Structure & Written Expression	Reading Comprehension	
Converted Score	41	40	39	400

Palembang, December 16th, 2014 B


 NBM/NIDN.854817/0001056201
 Dean

No. 265/LAB-BHS/FKIP-JMP/XII/2014

BIODATA PENULIS

Nama : Intan Prawesti
NIM : 22.2010.211
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Tempat/Tgl lahir : Palembang, 30 Januari 1992
Alamat : Jl. Kapten Abdullah Lr. Warga No.1029 Plaju Darat
Palembang
Nama Orang Tua :
Ayah : MB. Iskandar
Ibu : Yusniwati
Pekerjaan Orang Tua :
Ayah : Pegawai Swasta
Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Desa 3 Srinanti Rt. 04 Rw. 03 No 22 Kampung Bali Sungai
Gerong

Palembang, Agustus 2014

Mengetahui,

Intan Prawesti

NIM. 222010211